

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aktiva Tetap

1. Pengertian Aktiva Tetap

Aktiva tetap merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun. Menurut Juan (2012:340), menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang :

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative, dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, (2011:16.2) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Menurut Ilahi (2011:11), kategori aktiva tetap adalah sebagai berikut :

- a. Dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan.
- b. Nilainya cukup material dan bersifat relatif permanen.
- c. Digunakan dalam kegiatan normal perusahaan.
- d. Mempunyai manfaat dan daya guna lebih dari satu tahun.
- e. Tidak diperjualbelikan dalam kegiatan perusahaan.
- f. Dapat diobservasi dengan alat perasa fisik.

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, Waluyo (2010:92).

Menurut Soepriyanto (2010:2), aktiva tetap merupakan aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal.

Menurut Samryn (2011:36), aktiva tetap merupakan kelompok aktiva perusahaan yang mempunyai kriteria sebagai berikut: 1) Mempunyai masa manfaat, atau umur ekonomi lebih dari 1 tahun. 2) Dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam membantu aktivitas perusahaan. 3) Fisik barangnya dapat dilihat dan diraba, sehingga biasa juga disebut aktiva tetap berwujud. 4) Biasanya mempunyai nilai perolehan yang relatif besar.

Menurut Rudianto (2009:272) pengertian aktiva tetap sebagai berikut:

Aktiva tetap merupakan barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan bukan untuk diperjual belikan.

Menurut Kasmir (2008:39), aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Secara garis besar, aktiva tetap dibagi dua macam, yaitu: aktiva tetap yang berwujud (tampak fisik) seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lainnya, dan aktiva

tetap yang tidak berwujud (tidak tampak fisik) merupakan hak yang dimiliki perusahaan, contoh hak paten, merek dagang, goodwill, lisensi dan lainnya.

Menurut PSAK No. 16 Tahun 2009, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

2. Karakteristik Aktiva Tetap

Menurut Juan (2012:340), suatu aset tetap harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Aset tersebut digunakan dalam operasi. Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap (misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh diler mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sebagai persediaan).
2. Aset tersebut memiliki masa (umur) manfaat yang panjang, lebih dari satu tahun periode.
3. Aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki ciri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tak berwujud seperti hak paten dan merek dagang.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:16.6), suatu aktiva tetap harus memiliki karakteristik-karakteristik berikut:

- a. Aktiva yang hanya digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap (misalnya kendaraan bermotor yang

dimiliki oleh diler mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sabagai persediaan).

- b. Aktiva tersebut memiliki masa (umur) manfaat yang panjang atau lebih dari satu periode.
- c. Aktiva tersebut memiliki ciri-ciri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aktiva tak berwujud seperti hak paten dan merk dagang.

Menurut Firdaus (2008:177), beberapa karakteristik dari aset teta adalah:

- 1. Aset tetap adalah digunakan dalam kegiatan perusahaan dan bukan untuk diperjual belikan dalam kegiatan normal perusahaan.
- 2. Umur atau jangka waktu pemakaiannya lebih dari satu tahun.
- 3. Pengeluaran untuk aset tersebut harus merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material bagi perusahaan.

Menurut Kieso dan Weygandt (2007:2), karakteristik aktiva tetap adalah sebagai berikut:

- a. Aktiva tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali.
- b. Aktiva tersebut bersifat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan.
- c. Aktiva tersebut memiliki substansi fisik.

3. Klasifikasi Aktiva Tetap

Pengadaan aktiva tetap harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan sehingga investasi yang dilakukan terhadap aktiva tetap tidak akan sia-sia. Dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas operasionalnya perusahaan selalu menggunakan sarana-sarana penunjang bagi terlaksananya operasi perusahaan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu mengoptimalkan laba yang akan dihasilkan.

Aktiva tetap dapat dikelompokkan dalam berbagai sudut antara lain :

a. Sudut Substansi, Aktiva Tetap dapat dibagi :

1. Tangible Assets atau Aktiva berwujud seperti Lahan, Mesin, Gedung, dan Peralatan.
2. Intangible Assets atau Aktiva yang tidak berwujud seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Goodwill-Patents, Copyright, Hak cipta, Franchise, dan lain-lain.

b. Sudut Disusutkan Atau Tidak

1. Depreciated Plant Assets yaitu aktiva tetap yang disusutkan seperti Building (Bangunan), Equipment (Peralatan), Machinery (Mesin), Inventaris, Jalan dan lain-lain.
2. Undepreciated Plant Assets aktiva tetap yang tidak disusutkan seperti Land (Tanah).

c. Berdasarkan Jenis

Aktiva tetap berdasarkan jenis dapat dibagi sebagai berikut :

1. Lahan

Lahan adalah bidang tanah maupun tanah terhampar baik merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya harus dipisahkan pencatatannya dari lahan itu sendiri.

2. Bangunan/Gedung

Gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini baik di atas lahan/air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung itu.

3. Mesin

Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan.

4. Kendaraan

Semua jenis kendaraan seperti Alat Pengangkut, truck, grader, tractor, forklift, mobil, kendaraan roda dua, dan lain-lain.

5. Perabot

Dalam jenis ini termasuk perabot kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan.

6. Inventaris/Peralatan

Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang dan lain-lain.

7. Prasarana

Di Indonesia adalah merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti : Jalan, Jembatan, Riol dan lain-lain.

Menurut Niswonger, Warrn, Reeve, Fesc (2005:400,417), aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Aset berwujud (tangible assets) seperti aset pabrik (plant assets atau properti pabrik) dan peralatan (property, plant and equipment).

2. Aset tak berwujud (intangible assets) seperti paten, hak cipta, merek dagang dan goodwill.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara luas aktiva tetap dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Aktiva tetap berwujud yaitu yang mempunyai bentuk fisik dan nyata, dan digunakan dalam operasional seperti tanah, bangunan, peralatan, dan mesin.
- b. Aktiva tetap sumber alam seperti tambang, dan hasil hutan.
- c. Aktiva tetap tidak berwujud yaitu aktiva yang berupa hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai seperti hak paten, hak cipta, merk dagang, dan termasuk pula persetujuan dan perjanjian kontrak.

4. Penyajian Aktiva Tetap Di Laporan Keuangan

Aktiva tetap disajikan dineraca disebelah debet secara sistematis sesuai dengan sifat permanennya (urutan kekekalannya) yaitu dimulai dari aktiva yang paling lama umurnya atau masa manfaatnya sampai kepada aktiva tetap yang paling lama umurnya atau masa manfaatnya sampai pada aktiva tetap yang paling singkat umurnya.

Akumulasi penyusutan dari aktiva tetap disajikan sebagai pengurangan nilai aktiva tetap baik sendiri-sendiri atau secara keseluruhan. Tujuan penyajian aktiva tetap untuk memberikan gambaran kuantitatif dan jenis-jenis aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dan juga memberikan ramalan mengenai arus kas keluar dari aktiva tetap dimasa yang akan datang.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penyajian aktiva tetap dineraca adalah aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Dalam PSAK 2011:12 menyatakan:

Laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap:

- (a) Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto.
- (b) Metode penyusutan yang digunakan.
- (c) Umur manfaat atau tarif penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode, dan
- (d) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (i) Penambahan;
 - (ii) Aset yang diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok yang akan dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai dengan paragraf 45 atau pelepasan lainnya;
 - (iii) Akuisisi melalui penggabungan usaha;
 - (iv) Peningkatan atau penurunan akibat revaluasi sesuai dengan paragraf 31, 39, dan 40 serta dari segi penurunan nilai yang diakui atau dijurnal baik secara langsung pada ekuitas sesuai PSAK No. 48;
 - (v) Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi sesuai PSAK No. 48;
 - (vi) Rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laporan laba rugi sesuai PSAK No. 48, jika ada;
 - (vii) Penyusutan;
 - (viii) Selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mana uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor; dan
 - (ix) Perubahan lain.

Tabel II.1.
Penyajian Aktiva Tetap Dalam Neraca

Aktiva			
<i>Aktiva lancar</i>			
Kas		xxx	
Surat-surat berharga		xxx	
Piutang		xxx	
Persediaan		<u>xxx</u> +	
<i>Jumlah aktiva lancar</i>			xxx
<i>Aktiva tetap</i>			
Tanah		xxx	
Bangunan	xxx		
Akumulasi penyusutan	<u>(xxx)</u>		
Nilai buku		xxx	
Mesin dan alat	xxx		
Akumulasi penyusutan	<u>(xxx)</u>		
Nilai buku		xxx	
Perabot	xxx		
Akumulasi penyusutan	<u>(xxx)</u>		
Nilai buku		<u>xxx</u> +	
<i>Jumlah aktiva tetap</i>			<u>xxx</u> +
JUMLAH AKTIVA			xxx

Sumber : Zaki Baridwan, Intermediate Accounting

5. Harga Perolehan Aktiva Tetap

Aktiva tetap harus dicatat sebesar harga perolehan. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva dan pengeluaran-pengeluaran lain agar aktiva tetap siap untuk digunakan. Pajak

penjualan, biaya transportasi, asuransi aktiva tetap selama aktiva dalam perjalanan, pondasi khusus.

Menurut Juan (2012:341), seluruh pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap hingga siap untuk dipergunakan dicatat sebagai harga perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi :

1. Harga perolehannya termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Pada prinsip aset tetap yang diperoleh perusahaan dicatat berdasarkan harga perolehannya. Harga perolehan aset tetap meliputi harga faktur dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh aset tersebut sampai dapat digunakan dalam hubungannya dengan kepemilikan sampai aset tetap tersebut siap digunakan dicatat sebagai harga perolehan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2011:16.2) mendefenisikan sebagai berikut:

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat ditetapkan, jumlah yang didistribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain.

B. Penyusutan Aktiva Tetap

1. Pengertian Penyusutan

Menurut Komersial PSAK No. 16, Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan aktiva sepanjang masa manfaat. Menurut PSAK 16 tersebut jumlah yang dapat disusutkan adalah jumlah tercatatnya (baik mengikuti model biaya maupun model revaluasi) dikurangi dengan nilai residu aset yang bersangkutan, menurut Agoes (2012:104).

Menurut Komersial PSAK No. 16, Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan aktiva sepanjang masa manfaat. Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya.

Menurut PSAK No. 17, yang dimaksudkan penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan atau jumlah disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan

suatu aset atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisa, menurut Waluyo (2010:102).

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Sedangkan amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam, menurut Casavera (2009:127).

Menurut Rahardjo (2007:67), penyusutan didefinisikan untuk keperluan akuntansi sebagai penurunan nilai penggunaan aktiva tetap disebabkan karena pemakaian dan waktu. Aktiva tetap bisa juga menurun nilainya karena keusangan disebabkan adanya penemuan baru dan adanya teknik yang lebih canggih sehingga peralatan yang ada menjadi kedaluwarsa.

2. Dasar Penyusutan Aktiva Tetap

Di Indonesia dasar Penyusutan antara akuntansi dan pajak pada prinsipnya sama. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dasar penyusutan yang terdapat baik pada Standar Akuntansi Keuangan maupun Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Akuntansi pada umumnya menganut harga perolehan sebagai dasar pencatatan namun dalam beberapa hal dimungkinkan untuk dipakai nilai dasar yang lain seperti harga pasar, harga pasar, harga taksiran dan lain-lain. Menurut PSAK No. 16.05: Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang didistribusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisa.

Dasar penyusutan adalah Undang-Undang PPh yang berdasarkan nilai historis (*cost basis*). Nilai historis merupakan harga perolehan setelah disesuaikan dengan penambahan, perbaikan dan perubahan harta berwujud (*adjusted basis*). Berbeda dengan akuntansi komersial, dalam penyusutan menurut ketentuan pajak, nilai residu harta tidak diperhatikan. Apabila harta tersebut di revaluasi, nilai baru dari revaluasi tersebut merupakan dasar penyusutan.

Penyusutan aktiva dimulai pada saat aktiva tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aktiva tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aktiva siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan dari aktiva dihentikan lebih awal ketika:

- 1) Aktiva tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva dimiliki untuk dijual atau aktiva tersebut termasuk dalam kelompok aktiva yang tidak dipergunakan lagi dan diklasifikasikan sebagai aktiva dimiliki untuk dijual, dan
- 2) Aktiva tersebut dihentikan pengakuannya pada saat:
 - a. Dilepaskan, atau
 - b. Tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

3. Metode Penyusutan Aktiva Tetap

Menurut Ikatan Indonesia (2009:16.11), penyusutan aktiva tetap dapat dilakukan dengan berbagai macam metode antara lain adalah :

1. Berdasarkan waktu

a. Metode garis lurus

Metode ini mengasumsikan bahwa kegunaan aktiva pada setiap periode fiskal selalu sama. Metode ini merupakan metode yang sederhana dan mengabaikan produktivitas dan efesien, digunakan secara luas dan mudah dipahami.

b. Metode pembebanan menurun

Metode ini mempertimbangkan bahwa dengan bertambahnya usia aktiva tetap, maka prestasi yang dihasilkan juga menurun. Metode ini dibagi atas 3 bagian yaitu :

1. Metode jumlah angka tahun

Metode jumlah angka tahun menghasilkan pembebanan biaya penyusutan menurun dengan memakai angka pecahan yang diperoleh dari angka tahun kegunaan umur aktiva. Penyebut dari pecahan dihitung dengan dijumlahkan akumulasi angka tahun umur kegunaan aktiva, sedangkan pembilangannya merupakan angka bobot pada tahun pemakaian, metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari dasar penyusutan.

Contoh : aktiva dibeli dengan harga Rp. 14.000.000,- dengan nilai sisa Rp. 1.000.000,- masa manfaat 5 tahun maka tahunnya adalah :

a) Hitunglah jumlah angka tahun, yaitu 5 tahun maka angka tahunnya adalah $1+2+3+4+5=15$

b) Tentukan penyusutan pertahun :

$$\frac{\text{Sisa Umur Aktiva} \times (\text{C}-\text{S})}{\text{Jumlah Angka Tahun}}$$

$$\text{Tahun I : } 5/15 \times (15.000.000 - 1.000.000) = 4.666.666,66$$

$$\text{Tahun II : } 4/15 \times (15.000.000 - 1.000.000) = 3.733.333,33$$

$$\text{Tahun III : } 3/15 \times (15.000.000 - 1.000.000) = 2.800.000$$

$$\text{Tahun IV : } 2/15 \times (15.000.000 - 1.000.000) = 1.866.666,66$$

$$\text{Tahun V : } 1/15 \times (15.000.000 - 1.000.000) = 933.333,33$$

2. Metode saldo menurun/saldo menurun berganda

Metode ini menggunakan persentase yang tetap dari nilai buku aktiva tetap. Dalam metode ini, besarnya biaya penyusutan semakin lama menjadi lebih kecil dari tahun ke tahun, dengan dasar pemikiran bahwa kapasitas aset tetap dalam memberikan jasanya dari tahun ke tahun semakin menurun. Perhitungan biaya penyusutan :

$$\text{Biaya Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Perhitungan Penyusutan}$$

$$\text{Dasar Perhitungan Penyusutan} = \text{Harga Sisa Buku Awal Periode.}$$

Misalnya : Perusahaan membeli kendaraan dengan harga Rp.50.000.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan saldo menurun} = \frac{100\%}{5} = 20 \%$$

$$\text{Penyusutan saldo menurun} = 20\% \times 2 = 40\%$$

Tahun	Penyusutan	Akumulasi	Nilai buku
I	$40\% \times 50.000.000 = 20.000.000$	20.000.000	30.000.000
II	$40\% \times 30.000.000 = 12.000.000$	32.000.000	18.000.000
III	$40\% \times 18.000.000 = 7.200.000$	39.200.000	10.800.000
IV	$40\% \times 10.800.000 = 4.320.000$	43.520.000	6.480.000
V	$40\% \times 6.480.000 = 2.590.000$	46.110.000	3.890.000

2. Berdasarkan penggunaanya

a. Metode jam jasa

Metode ini mengasumsikan bahwa pembelian suatu ativa tetap merupakan pembelian sejumlah jam jasa langsung. Metode ini menggunakan suatu estimasi usia tetap dalam satuan jam jasa. Nilai prolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan total jam jasa menghasilkan tarif penyusutan perjam. Tarif tersebut dikalikan dengan penggunaan aktiva tetap selama periode untuk mendapatkan beban penyusutan periodik.

b. Metode jumlah unit produksi

Metode ini merupakan estimasi, yaitu estimasi total unit output yang akan dihasilkan. Nilai perolehan aktiva setelah dikurangi dengan nilai residu dibagi deengan total unit output yang akan dihasilkan dan merupakan tarif penyusutan perunit output. Tarif ini dikalikan dengan unti produksi yang diukur untuk satu periode dan menghasilkan beban penyusutan untuk periode tersebut.

3. Berdasarkan kriteria lainnya

a. Metode berdasarkan kelompok

Dalam metode ini aktiva yang serupa digabungkan dalam suatu kelompok sehingga penyusutan dikumpulkan dalam suatu perkiraan saja dan tingkat penyusutan dikumpulkan dalam suatu perkiraan saja dan tingkat penyusutan didasarkan pada umur rata-rata aktiva dalam kelompok itu.

Beban penyusutan diperoleh dengan membagi total nilai perolehan aktiva tetap setelah dikurangi total nilai residu dengan umur rata-rata aktiva tetap. Metode ini dapat digunakan untuk sekelompok aktiva tetap yang sama yang dibeli pada waktu bersamaan sehingga umur manfaat sama.

b. Metode berdasarkan jenis

Metode berdasarkan jenis atau komposit digunakan untuk suatu kelompok aktiva tetap yang mempunyai karakteristik dan umur ekonomis yang berbeda. Disebabkan ketidakseragaman umur diantara aktiva tetap tersebut, dicarilah persentasi rata-rata penyusutan yang dihitung dengan membuat suatu analisa terhadap umur dan beban penyusutan periode untuk setiap unit aktiva yang bergabung.

c. Metode Anuitas

Metode ini didasarkan pada kriteria waktu yang meningkatkan beban. Dalam perhitungannya, metode anuitas memerlukan penggunaan kalkulasi

bunga majemuk. Metode ini pada kenyataannya jarang dijumpai dalam praktek.

d. Sistem persediaan

Sistem ini dimaksudkan sebagai alternative lain jika terdapat kesulitan untuk menghitung penyusutan dengan cara biasa. Dalam metode ini perkiraan aktiva tetap di debet dengan harga perolehan aktiva. Setiap periode aktiva tersebut dinilai dan perkiraan aktiva dikurangi sampai pada jumlah penilaian tersebut, jumlah nilai yang dipakai sebagai pengurang itu dihitung sebagai beban penyusutan. Metode-metode penyusutan yang disebut sebelumnya adalah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

4. Jenis-Jenis Penyusutan Aktiva Tetap

Ada beberapa jenis penyusutan aktiva tetap, antara lain :

- a) Penyusutan (*Depreciation*) adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva tetap berwujud sepanjang masa manfaatnya.
- b) Amortisasi (*Amortization*) adalah alokasi sistematis biaya perolehan aktiva tak berwujud (misalnya patent, goodwill, trademark, franchise, dll) selama masa manfaatnya. Menurut PSAK, periode amortisasi tidak boleh melebihi 20 tahun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam 20 tahun sudah banyak perkembangan yang terjadi sehingga untuk tenggang waktu selebihnya aktiva tidak berwujud diprediksi tidak lagi memiliki manfaat keekonomian.
- c) Depleksi (*Depletion*) adalah proses penyusutan biaya perolehan atas sumber daya alam yang dimiliki perusahaan ke dalam periode akuntansi yang

memperoleh manfaatnya. Biaya yang dikapitalisasi biasanya meliputi biaya penguasaan, eksplorasi, dan pengembangan.

C. Penyusutan Menurut Pajak

a. Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Perpajakan

Undang-Undang pajak penghasilan secara khusus menetapkan saat mulainya penyusutan fiskal adalah pada bulan perolehan. Penyusutan harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut:

a) Harta/aktiva dalam pengerjaan.

Untuk harta/aktiva tetap dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pekerjaan tersebut. Jadi walaupun pada umumnya penyusutan atas harta/aktiva dimulai pada tahun perolehan tetapi untuk harta/aktiva yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun, perhitungan penyusutan dimulai saat selesainya harta/aktiva yang bersangkutan.

b) Harta/aktiva dalam usaha leasing.

Penyusutan terhadap harta/aktiva dalam usaha leasing khususnya sewa guna usaha tanpa hak opsi pada bulan harta tersebut disewa guna usahakan.

c) Wajib pajak yang mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan.

Misalnya penyusutan baru dilakukan pada tahun harta/aktiva tersebut menghasilkan.

Menurut Rusjd (2009:17), metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pajak Penghasilan adalah :

1. Metode garis lurus

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Contoh penggunaan metode garis lurus :

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp. 100.000.000,- dan masa manfaatnya 20 tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp.5.000.0000 ($\text{Rp.100.000.000} : 20$)

2. Metode saldo menurun

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan taat asas.

Contoh penggunaan metode saldo menurun :

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp. 150.000.000,-. Masa manfaat dan mesin tersebut adalah 4 tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya 50%, maka perhitungan penyusutannya sebagai berikut:

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai sisa buku
Harga perolehan			150.000.000,-
2000	50%	75.000.000,-	75.000.000,-
2001	50%	37.500.000,-	37.500.000,-
2002	50%	18.750.000,-	18.750.000,-
2003	Disusutkan sekaligus	18.750.000,-	0

Menurut Mardiasmo (2011:160), metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Metode garis lurus diperkenankan dipergunakan semua kelompok harta tetap berwujud. Sedangkan metode saldo menurun hanya diperkenankan digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja.

Menurut penjelasan pasal 11 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dikatakan bahwa metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan :

1. Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight-line method*); dan

2. Dalm bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*).

Menurut Muljono (2009:135), Pembebanan biaya atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun adalah melalui penyusutan. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan cara:

- a. Bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditentukan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight line method*).
- b. Bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*), dan pada akhir masa manfaat nilai buku akan disusutkan sekaligus, terkecuali untuk bangunan yang hanya menggunakan metode garis lurus.

Sesuai dengan Undang-Undang PPh, ketentuan yang berkaitan dengan penyusutan antara lain adalah :

- a. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, dimulai bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- b. Tarif penyusutan ditentukan sebagai berikut:

Tabel II.2**Pengelompokkan Harta Berwujud Dan Tarif Penyusutan**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

Sumber : Pasal 11 UU Nomor 36 Tahun 2008

Saat penyusutan dapat dimulai pada :

1. Bulan dilakukan pengeluaran.
2. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan pengeluaran harta tersebut selesai.
3. Dengan izin Direktorat Jenderal Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud ulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

Jenis-jenis pengelompokkan harta berwujud menurut Keputusan Menteri

Keuangan No.06/PMK.03/2009 adalah sebagai berikut:

Tabel II.3
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok I

NO.	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Semua Jenis Usaha	<p>1. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.</p> <p>2. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, <i>duplicator</i>, mesin fotokopi, <i>accounting machine</i>, dan sejenisnya.</p> <p>3. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/cassette</i>, <i>video recorder</i>, televisi dan sejenisnya.</p> <p>4. Sepeda motor, sepeda dan becak.</p> <p>5. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan.</p> <p>6. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman.</p> <p>7. <i>Dies</i>, <i>jigs</i> dan <i>mould</i>.</p>
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3.	Industri makanan dan Minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti <i>hulller</i> , pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pallet</i> dan sejenisnya.
4.	Perhubungan, Pergudangan, dan komunikasi	Mobil taksi, bus, truk yang digunakan sebagai angkutan umum
5.	Industri semi konduktor	<i>Falsh memory tester</i> , <i>write machine</i> , <i>bipolar test system</i> , <i>elimination pose cheker</i>

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No.06/PMK.03/2009

Tabel II.4
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok II

NO.	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Semua Jenis Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin dan peralatan dari logam, termasuk meja, bangku, kursi, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. 2. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. 3. Komputer, <i>printer</i>, <i>scanner</i>, dan sejenisnya. 4. Mobil, bus, truk, <i>speed boat</i>, dan sejenisnya. 5. <i>Container</i> dan sejenisnya
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanam, penanam benih, dan sejenisnya 2. Mesin yang mengelolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan
3.	Industri makanan dan Minuman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin yang mengelolah bahan asal binatang, unggas dan perikanan. Misalnya pabrik susu dan pengalengan ikan 2. Mesin yang mengubah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, biji-bijian, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengelola biji-bijian. 3. Mesin yang mengelola/menghasilkan minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. 4. Mesin yang menghasilkan/mengelola makanan makanan segala jenis
4.	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan, misalnya mesin jahit, dan pompa air

5.	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebang kayu
6.	Kontruksi	Peralatan yang digunakan seperti truk berat, truk <i>drump</i> , <i>crane bulldozer</i> , dan sejenisnya
7.	Perhubungan, Pergudangan dan Komunikasi	1. Truk kerja pengangkutan dan bongkar muat 2. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang 3. Kapal yang dibuat khusus sebagai kapal suar dan pemadam kebakaran 4. Perahu layar yang beratnya sampai 250 DWT 5. Kapal Balon
8.	Telekomunikasi	1. Perangkat telepon 2. Pesawat telegrap, termasuk pesawat pengirim
9.	Industri semikonduktor	<i>Auto frame leader, aoutomatic logic handler etc.</i>

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No.06/PMK.03/2009

Tabel II.5

Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok III

NO.	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Pertambangan selain minyak	Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengelola produk perikanan
2.	Pemintalan, pertenunan, dan pencelupan	1. Mesin yang mengelola produk tekstil. 2. Mesin untuk <i>yarm preparation</i>
3.	Perkayuan	1. Mesin yang mengelola produk-produk kayu barang-barang dari jerami. 2. Mesin dan peralatan pengrajin kayu.
4.	Industri Kimia	1. Mesin yang mengelola produk industri kimia dan yang berhubungan dengan bahan kimia. 2. Mesin yang mengelola produk kimia lainnya

		seperti dammar tiruan
5.	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin berat dan menengah
6.	Perhubungan dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang 2. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal 3. Dok terapung 4. Perahu layar pakai atau tanpa motor sampai 250 DWT 5. Pesawat terbang dan helikopter sejenisnya
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No.06/PMK.03/2009

Tabel II.6

Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok IV

NO.	JENIS USAHA	JENIS HARTA
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Perhubungan dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokomotif UAP dan tender atas rel 2. Lokomotif listrik atas rel 3. Lokomotif atas rel lainnya 4. Kereta, gerbong penumpang dan barang termasuk container 5. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang 6. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal 7. Dok-dok terapung

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No.06/PMK.03/2009

D. Koreksi terhadap Perhitungan Laba Komersial dan Laba Fiskal karena Perbedaan Penerapan Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap.

Menurut Agoes (2012:218), Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dengan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan/koreksi terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

1. Koreksi Fiskal

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006:421) “koreksi fiskal adalah penyesuaian ketentuan pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut Ketentuan Perpajakan.” Perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan, harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, karena tidak semua ketentuan dalam standar akuntansi keuangan digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan standar akuntansi keuangan. Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca atau laporan laba rugi.

2. Faktor-Faktor Penyebab Koreksi Fiskal.

Menurut Resmi (2009:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

1) Perbedaan prinsip akuntansi.

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis tetapi tidak diakui dalam fiskal.

2) Perbedaan metode dan prosedur akuntansi.

- a. Metode penilaian persediaan.
- b. Metode penyusutan dan amortisasi.
- c. Metode penghapusan piutang.

3) Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya.

- a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final.
- c. Perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - a) Kerugian suatu usaha diluar negeri.
 - b) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya.

4) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan

bruto, tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga dalam SPT Tahunan PPh, merupakan koreksi fiskal positif. Contoh: diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

3. Jenis-Jenis Koreksi Fiskal.

1) Beda Tetap (*Permanent Differences*).

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Sehingga akan mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (*Pre Tax Income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*Taxable Income*).

2) Beda Waktu (*Timing Differences*).

Adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial tapi belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Biasanya perbedaan ini bersifat sementara. Perbedaan ini, diakibatkan oleh perbedaan metode dalam hal: Akrua dan realisasi, Penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud, Penilaian persediaan, dan Kompensasi kerugian fiskal.

Koreksi atas beda waktu akan menyebabkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif tergantung metode yang digunakan. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang.

4. Koreksi Fiskal Positif.

Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat.

Menurut Muljono (2006), Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil, sehingga akan mengakibatkan penambahan penghasilan. Adapun transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi positif antar lain:

- a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapat, menagih, dan memelihara pendapatan.
- b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- c. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut Wajib Pajak lebih tinggi.
- d. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

Menurut Agoes (2012:219), koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif dilakukan akibat adanya:

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*).
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

5. Koreksi Fiskal Negatif.

Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutanganya juga akan menurun.

Menurut Muljono (2006), Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang terjadi karena adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, sehingga mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain:

- a. Biaya yang diakui lebih besar, seperti: Penyusutan menurut wajib pajak lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya.
- b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.

E. Aktiva Tetap Dalam Pandangan Islam

Dalam persepsi Islam aktiva tetap pada perusahaan berarti juga harta yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Sesuatu harta diperoleh atau didapat oleh manusia haruslah dengan cara yang halal dan tidak melanggar norma-norma atau larangan-larangan yang dilarang oleh agama, seperti perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia, memakan harta sesama atau mendapatkan harta tersebut dengan menipu atau mencuri.

Penggunaan harta itu sendiri sebaiknya digunakan sebaik-baiknya terdapat dalam Al-Baqarah 282, yang Artinya :

[illegible]

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Pada ayat diatas Allah SWT menerangkan ketentuan-ketentuan dalam bermuamalah yang didasarkan keadilan dan kerelaan masing-masing pihak,

sehingga keragu-raguan dan buruk sangka bisa dihilangkan. Dimana Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah SWT setiap melakukan perjanjian perserikatan secara tidak tunai yaitu melengkapinya dengan bukti-bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin akan timbul dikemudian hari.

Adapun pembuktian itu adalah:

a. Bukti tertulis

Bukti tertulis hendaknya ditulis oleh “juru tulis” yang menuliskan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Juru tulis itu hendaknya orang yang adil dan mengetahui hukum-hukum Allah SWT terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian. Tugas juru tulis adalah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

b. Saksi

Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui kejadian atau peristiwa. Dimana saksi tersebut adalah orang muslim yang dapat dipercaya.